

**PENGARUH OPINI AUDIT DAN
TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI
DI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**
(Studi Kasus di Kab. Keerom, Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura)

**Vinsensius Jehandu
Agustinus Salle
Paulus K. Allo Layuk**

Abstract

The purpose of the study is to identify the relationship between public perceptions about audit opinion, audit findings and the level of corruption in Papua Province (Case Study of the Government of Keerom Regency, Jayapura Regency and Sarmi Regency). A sample of 120 respondents consisted of 40 respondents from each district. Data collection techniques through questionnaires and data analysis using the Partial Least Square (PLS) approach. The results showed the greater the perception of audit opinion the greater the trust in corruption handled by the auditor. Meanwhile, the results of the study showed that the magnitude of audit findings carried out by BPK influenced the level of corruption that occurred. Audit findings can detect corruption in the government and local government efforts to make improvements according to the auditor's recommendations can significantly reduce the level of corruption.

Keywords: Audit Opinion, Audit Findings, Corruption Level

PENDAHULUAN

Isu yang berkembang mengenai korupsi di Indonesia merupakan isu yang tidak pernah berhenti untuk diperbincangkan. Di tingkat internasional, Indonesia menjadi salah satu negara yang sering disebut saat membicarakan permasalahan korupsi (Simanjuntak., et al., 2010). Korupsi bukanlah fenomena yang baru muncul setelah adanya reformasi. Cameron., et al (2009) mengungkapkan bahwa tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (yang dikenal dengan KKN) sebelum adanya reformasi, tersentralisasi di kalangan keluarga Presiden, para pemimpin militer, dan konglomerat China. Namun sejak munculnya demokrasi yang diperkenalkan pada era reformasi tahun 1998, kasus korupsi menjadi lebih mudah teridentifikasi dengan adanya kebebasan media.

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam menentukan kualitas pemerintahan (Mardiasmo, 2009). Tingginya tingkat korupsi di suatu negara membuktikan buruknya penyelenggaraan pemerintahan di negara tersebut karena peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik dapat terdistorsi dengan adanya fenomena korupsi (Gupta., et al., 2002). Upaya pemberantasan

korupsi di Indonesia tidak lepas dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam organisasi (Dwiputranti, 2008). Fungsi pemeriksaan salah satunya dapat diterapkan dengan melakukan audit. Proses audit baik internal maupun eksternal berperan penting dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi (Kaufman., et al., 2006) misalnya pengeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau hilang (Olken, 2007; Schelker dan Eichenberger, 2010). Selain itu, hasil audit yang berupa laporan audit juga dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku korupsi di tingkat pemerintah lokal (Liu dan Lin, 2012).

Penelitian ini fokus pada peran auditor dalam mendeteksi adanya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dan persepsi masyarakat terhadap opini audit yang dilakukan oleh auditor. Penelitian empiris mengenai peran auditor dalam mendeteksi adanya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah telah dilakukan oleh Liu dan Lin (2012), hasil penelitiannya membuktikan bahwa temuan audit dapat mendeteksi adanya tindakan korupsi di pemerintah dan upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.

Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK berupa opini audit, temuan audit, kesimpulan audit, maupun rekomendasi yang dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Dalam IHPS BPK, tentang Jenis Opini, opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Kasus korupsi di Pemerintah Provinsi Papua banyak melibatkan pejabat publik di Papua yang terlibat kasus korupsi, sepertinya tidak terbantahkan lagi. Selain yang sudah dan tengah diadili di pengadilan luar Papua, juga tidak sedikit yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura. Sayangnya selama ini belum ada data pasti berapa jumlah pejabat di Papua yang sudah dan tengah terkena kasus korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi Kabupaten Keerom, melalui Ketua masyarakat Adat Kabupaten Keerom menyatakan bahwa selama ini kasus korupsi di Kabupaten Keerom banyak membiarkan proses hukum berjalan tanpa kawalan ketat dari Instansi penegak hukum baik itu Kejaksaan, Polri dan KPK. Atas kejadian dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Keerom atas nama masyarakat Keerom melalui Ketua masyarakat Adat Kabupaten Keerom melaporkan kejadian korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta (Pewarta Indonesia, 2012).

Kasus korupsi yang terjadi Kabupaten Sarmi tahun 2015 pada Kasus korupsi pembangunan jalan di Sarmi. Pada kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp10,9 miliar. Rencana pembangunan jalan dalam kota Sarmi sepanjang 1,8 km dengan lebar jalan 18 meter pada kenyataannya yang dikerjakan hanya penimbunan dan pematangan jalan. Selain itu juga proses tender yang dilakukan juga tidak sesuai dengan prosedur yang benar, pembangunan jalan tersebut langsung dikerjakan tanpa melalui tender atau proses pelelangan (Papua News, 2017).

Sedangkan pada kasus korupsi ditahun 2012, puluhan masyarakat adat dan warga lainnya dari Kabupaten Sarmi Provinsi Papua, mendatangi Pengadilan Negeri Jayapura guna mempertanyakan terdakwa kasus korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2012/2013. Pada kasus ini kerugian negara senilai 54 milyar. Masyarakat Sarmi yang berdemo mengusung sejumlah spanduk yang bertuliskan berbagai hal soal ketidakadilan hukum, diantaranya bertuliskan `Pengadilan Negeri Jayapura jangan tegakkan hukum tumpul keatas dan tajam kebawa sehingga rakyat menjadi korban (Antara Papua, 2015).

Kasus korupsi di Kabupaten Keerom pada tahun 2007 pada proyek pembangunan jalan dan jembatan ruas jalan Waley-Molof sepanjang 5,5 KM, tahun anggaran 2007 sebesar Rp 1,6 milyar dinilai fiktif. Pada kasus ini penyedia jasa diberikan kuasa untuk mengerjakan pembangunan jalan dan jembatan ruas jalan Waley-Molof sesuai dengan kontrak (Surat Perjanjian Permohonan) Nomor : 620/92/KONT/DPU/2007, tanggal 13 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.6 Milyar. "Proyek pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Penyedia Jasa dilain pihak kuasa pengguna anggaran menandatangani

seluruh pencairan dana proyek pembangunan jalan dan jembatan ruas jalan Waley-Molof namun tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dikarenakan tidak dilakukan tender atau lelang oleh Panitia lelang, padahal dalam Peraturan Presiden yang mengatur harga barang dan jasa di atas Rp 500 juta harus dilakukan tender atau lelang (Berita Satu, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah (1) Untuk mengidentifikasi keterkaitan antara persepsi masyarakat tentang opini audit terhadap korupsi di pemerintah Provinsi Papua; (2) Untuk mengidentifikasi keterkaitan antara temuan audit terhadap korupsi di pemerintah Provinsi Papua (2) Untuk mengidentifikasi keterkaitan antara persepsi masyarakat tentang opini audit, temuan audit terhadap korupsi di pemerintah Provinsi Papua.

Audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Opini audit merupakan pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen (Arens., et al., 2011:4).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Coram., *et al* (2008) menyatakan bahwa organisasi yang memiliki fungsi internal audit akan lebih dapat mendeteksi kecurangan akuntansi dan melaporkannya sendiri.

Korupsi sudah terjadi sejak zaman dahulu dan merupakan suatu peristiwa universal yang dapat terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Terminologi korupsi dari bahasa

latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya istilah korupsi muncul dalam beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa Perancis dengan kata *corruption*, dan bahasa Belanda menggunakan kata *corruptie* yang selanjutnya menjadi “korupsi” dalam bahasa Indonesia (Jahja, 2012:7). Shah (2007) menyatakan bahwa terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung kepada sejumlah faktor yakni 1) kualitas manajemen sektor public, 2) sifat alamiah (kondisi) hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat, 3) kerangka hukum, 4) tingkatan proses sektor public dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi informasi. Menurut Shah (2007), upaya mengatasi korupsi tanpa mempertimbangkan keempat faktor ini akan menyebabkan hasil yang kurang mendalam dan tidak berkelanjutan.

Fraud menurut SPA 240 menjelaskan kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Prasetyo, et al (2003) dalam Arles (2014) menyatakan bahwa definisi kecurangan (fraud) menurut Black Law Dictionary adalah : *“a knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment, is usual a tort, but in some cases (esp when the conduct is willful) it may be a crime.”*

METODE PENELITIAN

Penelitian dikembangkan dari penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu serta pendapat beberapa pakar. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dalam bentuk persepsi tentang opini audit, temuan audit terhadap korupsi yang dikumpulkan memakai kuisisioner secara langsung. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, formulir, bukti, catatan, media, web maupun dokumen-dokumen lainnya.

1. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 120 responden yang terdiri dari masing-masing kabupaten sebanyak 40 responden. Sedangkan sampel dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria inklusi seperti : (1) Bersedia jadi responden; (2) Bisa membaca dan menulis; (3) Kuisioner di kembalikan kepada peneliti; (4) Kuisioner harus di isi dengan lengkap. Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel yang tersisa untuk di jadikan responden yakni sebanyak 80 responden sedangkan sisanya di karenakan kuisioner tidak dikembalikan dan tidak di isi dengan lengkap.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2011), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

a. Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini digunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian dan deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata (*mean*) kisaran aktual, kisaran teoritis, penyimpangan baku (*standard deviation*), dan kecenderungan jawaban responden.

b. Model Pengukuran atau Outer Model

Outer Loading merupakan Outer Model yang paling efektif yang digunakan untuk mengukur validitas konvergen dari model pengukuran (instrumen) dari perhitungan *cross loading (discriminant validity)* masing-masing harus bernilai diatas 0,7. Korelasi antar item skor/komponen skor dengan konstruk skor yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup menurut Chin (1998) dalam Ghazali (2011:14). Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading

pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik dari pada ukuran blok lainnya. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha dan nilai composite reliability. Untuk dapat dikatakan suatu konstruk reliabel, maka nilai cronbach's alpha harus $> 0,6$ dan nilai composite reliability harus $0,7$ (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:30).

3. Model Struktural atau Inner Model

Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square* test untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2011:15). Disamping melihat nilai *R-square*, model PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Menurut Hair et al, (2006) dalam Abdillah dan Jogiyanto (Abdillah dan Jogiyanto, 2015:31), skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan oleh nilai t-statistic, harus diatas $1,96$ untuk pengujian alpha 5% .

3. Definisi Operasional

- a. Persepsi tentang Opini Audit. *adalah anggapan masyarakat tentang pernyataan profesional dari auditor sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*

- b. Persepsi Temuan Audit. merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan audit baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan.
- c. Persepsi Korupsi. Korupsi bermakna penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk keperluan pribadi atau orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden disusun berdasarkan hasil jawaban dari pertanyaan kuisisioner yang telah diisi oleh responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, masa kerja dari total 80 responden. Nilai persentase didapatkan dari banyaknya jawaban responden di bagi dengan total sampel. Hasil selengkapnya mengenai karakteristik responden dapat dilihat sebagaimana terlihat dalam uraian berikut:

Tabel 1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	58	72,5%
Perempuan	22	27,5%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data Diolah

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 80 responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58 atau 72,5% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 atau 27,5%. Ini dapat disimpulkan bahwa responden lebih banyak adalah laki-laki.

Tabel 2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Peresentase
26- 45 Tahun	66	82,5
46-60 Tahun	14	17,5
Jumlah	80	100%

Sumber : Data Diolah

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar umur responden di dalam penelitian ini adalah 26- 45 tahun sebanyak 66 responden atau sebesar 82,5%, berumur 46- 60 tahun sebanyak 14 responden atau sebesar 17,5% Kesimpulan yang dapat diperoleh dari data di atas yaitu bahwa sebagian besar responden berumur 26- 45 tahun.

Tabel 3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Peresentase
SMA	8	10%
Diploma	8	10%
S1	59	73,75%
S2/S3	5	6,25%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data Diolah

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan responden di dalam penelitian ini sebagian besar responden berpendidikan S1 sebanyak 59 responden atau sebesar 73,75%, berpendidikan SMA sebanyak 8 responden atau sebesar 10%, dan berpendidikan diploma sebanyak 8 responden atau sebesar 10 %, berpendidikan S2/S3 sebanyak 5 responden atau sebesar 6,25%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari data di atas yaitu bahwa sebagian besar responden berpendidikan S1.

Tabel 4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Peresentase
Pelajar/Mahasiswa	9	11,25%
PNS	30	37,5%
Pegawai Swasta	20	25%
Wiraswasta	10	12,5%
Ibu Rumah Tangga	7	8,75%
Lainnya	4	5%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data Diolah

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan responden di dalam penelitian ini sebagian besar pekerjaan adalah PNS sebanyak 30 responden atau sebesar 37,5%, pegawai swasta sebanyak 20 responden atau sebesar 25%, wiraswasta sebanyak 10 responden atau sebesar 12,5%, pelajar/mahasiswa sebanyak 9 responden atau sebesar

11,25%, ibu rumah tangga sebanyak 7 responden atau sebesar 8,75 % dan lainnya sebanyak 4 responden atau sebesar 5%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari data di atas yaitu bahwa sebagian besar pekerjaan responden adalah PNS.

Tabel 5.
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

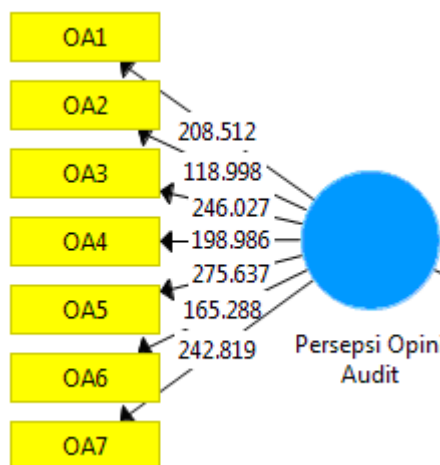
Masa Kerja	Jumlah	Peresentase
< = 15 Tahun	34	42,5%
> 15 Tahun	46	57,5%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data Diolah

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa Masa Kerja responden di dalam penelitian ini sebagian besar adalah masa kerja > 15 Tahun sebanyak 46 responden atau sebesar 57,5%, masa kerja < = 15 Tahun sebanyak 34 responden atau sebesar 42,5%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari data di atas yaitu bahwa sebagian besar responden masa kerja > 15 Tahun.

2. Pembahasan

- a. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua



Gambar 1. Koefisien Pertanyaan Persepsi Opini Audit

Berdasarkan gambar di atas, maka di dapatkan bahwa item pertanyaan pada variabel persepsi opini audit yang paling berpengaruh terhadap korupsi adalah item5 sebesar 275,637, item3 sebesar 246,027 dan item7 sebesar 242,819.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama didapatkan bahwa nilai original sample estimate LS adalah sebesar 0,426 dengan signifikansi dibawah 5% yang ditunjukkan dengan nilai t- statistik 2,613 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,962 dan nilai sig (p Vvalue) $0,009 < \alpha (0,05)$ mengindikasikan bahwa persepsi opini audit

berpengaruh positif terhadap korupsi. Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini menandakan bahwa semakin besar persepsi opini audit semakin besar juga kepercayaan terhadap korupsi yang ditangani oleh pihak auditor.

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersenut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2011:4) adalah proses membandingkan bukti dengan kriteria yang telah ditetapkan dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Sementara audit sektor publik menurut Agung (2008) adalah kegiatan yang ditunjukkan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan.

Kriteria auditor dalam memberikan opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak terbatas pada kesesuaian dengan standar akuntansi dan kecukupan pengungkapan, tetapi juga penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern. Huefner (2011), dua kriteria terakhir dapat digunakan sebagai deteksi adanya tindakan kecurangan di lingkungan pemerintah daerah.

Opini audit merupakan faktor yang terpenting untuk menjadi tolok ukur dari efektivitas pengawasan dan penilaian kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Virgasari, 2009). Pemberian opini audit BPK digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu indikator pemberian reward dan punishment. Pemerintah daerah akan memperoleh insentif tambahan (*reward*) jika

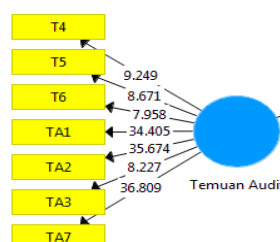
memenuhi tiga jenis kriteria dalam sistem pemberian reward tersebut, yang salah satunya diantaranya adalah memperoleh opini WTP (Kurniawan, 2013).

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit yang wajar menunjukkan akuntabilitasnya baik dan diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi, demikian juga sebaliknya.

Hubungan antara opini audit dan kinerja pemerintah daerah telah dibuktikan secara empiris oleh Ismunawan (2016) dimana opini audit memiliki pengaruh terhadap korupsi pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Masyitoh et al. (2015) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Semakin baik opini audit yang diperoleh menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Hasil serupa juga dinyatakan dalam penelitian Rini dan Sarah (2014) yang menyatakan bahwa terdapat kaitan antara opini yang diberikan oleh BPK RI dengan korupsi.

Liu dan Lin (2012) yang juga membuktikan adanya pengaruh negatif dari upaya pembetulan audit terhadap tingkat korupsi. Selain itu, hasil pengujian ini memberikan bukti empiris atas pendapat Dwiputrianti (2008) dan Umar (2012) yang menyatakan bahwa adanya rekomendasi dari auditor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah menambah efektivitas laporan keuangan dan membantu mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, serta pemborosan keuangan daerah.

b. Apakah Temuan Audit berpengaruh terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua



Gambar 2 Koefisien Pertanyaan Temuan Audit

Berdasarkan gambar di atas, maka di dapatkan bahwa item pertanyaan pada variabel temuan audit yang paling berpengaruh terhadap korupsi adalah item 7 sebesar 36,809, item2 sebesar 35,674 dan item1 sebesar 34,405.

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua didapatkan bahwa nilai original sample estimate LS adalah sebesar 0,308 dengan signifikansi dibawah 5% yang ditunjukkan dengan nilai t- statistik 2,047 dan nilai sig (p Vvalue) $0,041 < \alpha (0,05)$ mengindikasikan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap korupsi. Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hal ini menandakan bahwa besarnya temuan audit yang dilakukan oleh BPK mempengaruhi tingkat korupsi yang terjadi.

Profitabilitas temuan audit merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan audit baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan.

Berdasarkan survey yang dilakukan ACFE lemahnya pengendalian intern menjadi penyebab utama terjadinya kecurangan. Hasil yang sama juga ditemukan dari hasil survey KPMG yang dikutip dalam Huefner (2011) yang membuktikan bahwa penyebab yang paling signifikan atas kecurangan yang terjadi di pemerintahan adalah lemahnya pengendalian intern.

Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, organisasi dapat meminimalisasi kecurangan dan meningkatkan peluang untuk mendeteksi kesalahan dalam akuntansi, yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak. Huefner (2011) menyatakan bahwa cara yang utama untuk mencegah terjadinya kecurangan yaitu dengan adanya sistem pengendalian intern yang kuat.

Petrovits *et al.* (2009) dalam Masyitoh., *et al.* (2015) meneliti organisasi non-profit yang menggunakan dana yang berasal dari donor publik, dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa pendonor bereaksi atas informasi mengenai pengendalian intern baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern merupakan aspek yang amat penting

dalam pengelolaan organisasi termasuk organisasi pemerintah. Huefner (2011) juga melakukan penelitian mengenai kasus kelemahan pengendalian intern di pemerintah daerah yang diperoleh dari rincian laporan audit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Huefner (2011), temuan audit atas sistem pengendalian intern dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan di lingkungan pemerintah daerah.

Ferraz dan Finan (2011) menyatakan peraturan dalam pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas yang memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi. Begitu pula dengan Najahningrum (2013) yang menyebutkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pada dinas Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpatuhan atas perundang-undangan akan mengakibatkan meningkatnya kecenderungan kecurangan.

Penelitian lainnya terkait temuan audit dan tingkat korupsi dilakukan oleh Masyitoh et al. (2015) yang menyatakan bahwa temuan audit atas ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Semakin banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan pada perundang-undangan menunjukkan persepsi korupsi yang lebih tinggi.

Liu dan Lin (2012) membuktikan bahwa temuan audit dapat mendeteksi adanya tindakan korupsi di pemerintah dan upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi.

SIMPULAN

Hipotesis pertama diterima, hal ini menandakan bahwa semakin besar persepsi opini audit semakin besar juga kepercayaan penanganan Korupsi oleh pihak auditor. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit laporan keuangan

menunjukkan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktik korupsi. Opini audit yang wajar menunjukkan akuntabilitasnya baik dan diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi, demikian juga sebaliknya

Hipotesis kedua diterima, hal ini menandakan bahwa besarnya temuan audit yang dilakukan oleh BPK mempengaruhi tingkat korupsi yang terjadi. Profitabilitas temuan audit merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan audit baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan. Huefner (2011) yang membuktikan bahwa penyebab yang paling signifikan atas kecurangan yang terjadi di pemerintahan adalah lemahnya pengendalian intern. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, organisasi dapat meminimalisasi kecurangan dan meningkatkan peluang untuk mendeteksi kesalahan dalam akuntansi, yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS, cetakan. Keempat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy* , 115, 200-249.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Alonsi-Terme, R. (2002). Does corruption affect income inequality and poverty? *Economics of Governance* , 3, 23-45.
- Simanjuntak, F., Digdowiseiso, K., & Saputro, P. A. (2010). *Mengukur korupsi di Indonesia*. Jakarta: Asia Foundation.
- Cameron, L., Chaudhuri, A., Erkal, N., & Gangadharan, L. (2009). Propensities to engage in and punish corrupt behaviour: Experimental evidence from Australia, India, Indonesia and Singapore. *Journal of Public Economics* , 93, 843-851.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* , 2 (1).
- Yuda, H. (2010). *Korupsi dan industrialisasi pilkada*. Diambil kembali dari www.antikorupsi.org
- Dwiputranti, E. (2008). Efektivitas laporan hasil temuan pemeriksaan dalam mewujudkan reformasi transparansi fiskal dan akuntabilitas sector publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi* , V (4).
- Kaufman, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2006). Measuring corruption: Myths and realities. *The World Bank* .
- Schelker, M., & Eichenberger, R. (2010). Auditors and fiscal policy: Empirical evidence on a little big institution. *Journal of Comparative Economics* (38), 357-380.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research* , 5.

- Khan, M. A. (2006). *Role of audit in fighting corruption*. St. Petersburg, Russia: Ad Hoc Group Meeting on "Ethics, Integrity, and Accountability in the Public Sector: Re-building Public Trust in Government through the Implementation of the UN Convention against Corruption.
- Huefner, R. J. (2011). Fraud risks in local government: An analysis of audit findings. *Journal of Forensic & Investigative Accounting* , 3 (3), 111-125.
- Virgasari, A. (2009). *Hubungan antara opini audit pada laporan keuangan daerah, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum dengan kinerja keuangan daerah*. : Universitas Brawijaya.
- Kurniawan. (2013). *Laporan keuangan pemerintah daerah: problematika dan solusi*. Diambil kembali dari <http://inspektorat.slemankab.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-problematika-dansolusi>
- Arles, L. (2014). *Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Fraud : Predator vs. Accidental Fraudster Diamond theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik) Suatu Kajian Teoritis*. Riau: Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Pewarta Indonesia. (2012). *Korup, Wakil Bupati Keerom Dilaporkan ke KPK*. Diambil kembali dari <http://www.pewarta-indonesia.com/ppwi/pengurus-cabang/7366.html>
- Papua News. (2017). *Kasus Korupsi Pembangunan Jalan di Sarmi Dilimpahkan Ke Kejaksaan Jayapura*. Diambil kembali dari <https://papuanews.id/2017/08/22/kasus-korupsi-pembangunan-jalan-di-sarmi-dilimpahkan-ke-kejaksaan-jayapura/>
- Antara Papua. (2015). *Puluhan warga Sarmi pertanyakan terdakwa korupsi dibebaskan*. Diambil kembali dari <https://papua.antaranews.com/berita/450072/puluhan-warga-sarmi-pertanyakan-terdakwa-korupsi-dibebaskan>
- Berita Satu. (2014). *Teribat Korupsi Mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Keerom Ditangkap*. Diambil kembali dari <http://sp.beritasatu.com/home/teribat-korupsi-mantan-kepala-dinas-pu-kabupaten-keerom-ditangkap/62397>
- Shah, A. (2007). *Performances Accountability and Combating Corruption*. Washington DC: The World Bank.
- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Ed.1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Agung, G. R. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep Praktik Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismunawan. (2016). *Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
- Masyitoh, R. D., W, R., & Dyah, S. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara* , 16-19.
- Rini, & Sarah, A. (2014). Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Etikonomi* , 13 (1).
- Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing* , 8 (2), 95-189.
- Ferraz, C., & Finan, F. (2011). Electoral accountability and corruption: Evidence . *American Economic Review* , 101 (4).
- Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Anaysis Journal* , 2 (3).
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi*. Jakarta.
- Tanzi, V. (2008). Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. *International Monetary Fund Staff Papers* , 45 (4).

- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2013). *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*. Washington DC: Management System International.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). *Fraud Examination*. Mason: SouthWestern.
- Silverstone, H., Pedneault, S., Rudewicz, F., & Sheetz, M. (2007). *Forensic Accounting and Fraud Investigation for NonExperts*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukanto, E. (2007). *Perbandingan Persepsi Antara Kelompok Auditor Internal, Akuntan Publik, Dan Auditor Pemerintah Terhadap Penugasan Audit Kecurangan (Fraud Audit) Dan Profil Auditor Kecurangan (Fraud Auditor)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah, Edisi 3*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa). *Buletin Ekonomi* , 11 (1), 1-86.
- Rini, & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* , 4 (1), 73-90.
- Siregar, R. A., & Setyaningrum, D. (2012). *Analisis Pengaruh Peran Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) Terhadap Opini Dan Temuan Audit*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2016). *e-Proceeding of Management* , 4 (2), 1638.
- Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit WTP Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual* , 4 (1), 22-33.
- Masdiyantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 14 (2), 1150-1182.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan kelimabelas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan*. Semarang: BP Undip.